

# Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu

**SIARAN PERS** 

Jalan Adam Malik KM. 8, Gading Cempaka, Bengkulu Call Center 081 181 123 123

# Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2022 Seluma Naik, Kaur Turun

### Bengkulu – Humas BPK

Tahun Anggaran 2022 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Kaur harus merelakan kehilangan predikat tertinggi dari pengelolaan keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dapat dipertahankan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kabar baik bagi Pemkab. Seluma setelah tahun lalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka dengan pembenahan yang dilakukan oleh Pemkab. Seluma yang didukung dengan komitmen pimpinan dan kerja keras seluruh jajarannya, maka pada Tahun Anggaran (TA) 2022 ini Pemkab. Seluma dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Pemkab. Seluma dan Pemkab. Kaur yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA.** pada acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2022, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Jumat, 12 Mei 2023.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab. Seluma dan Pemkab. Kaur, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

#### Pada Pemkab. Seluma:

- a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Maksimal dan Terdapat Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 11 SKPD Terindikasi Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya;
- c. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas 17 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR;
- d. Penatausahaan Aset Tetap di lingkungan Pemkab Seluma belum sepenuhnya memadai; dan
- e. Kelebihan Pembayaran atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Pada Pemkab. Kaur:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Tujuh SKPD Lebih Bayar, Tidak Dapat Diyakini Kewajarannnya, dan Terdapat Pemborosan;
- b. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya;
- c. Pertanggungjawaban Dana BOS pada Dua Satdikdas Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya; dan
- d. Penganggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Belum Sesuai Prioritas Anggaran.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2022 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab. Seluma adalah sebesar 78,87%, dan Pemkab. Kaur adalah sebesar 83,26%.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (\*\*\*/htu)

# SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:
Medy Oktrian
Plh. Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu